

## BAB II

### Sejarah dan Faktor Pendorong Terjadinya Kasus Femisida di Meksiko

#### 2.1 Femisida Di Meksiko

Meksiko merupakan negara yang memiliki kasus femisida tertinggi, hal ini menjadi permasalahan yang serius dan telah melekat. Tercatat Meksiko menduduki peringkat 14 dari 25 negara di Amerika Latin dengan kasus pembunuhan terhadap perempuan<sup>39</sup>. Jika dilihat dalam sejarah Meksiko sendiri merupakan negara bekas jajahan Spanyol, dimana Spanyol merupakan negara kekaisaran dan mengimplementasikan sistem patriarki dan kemudian melekat pada masyarakat Meksiko.<sup>40</sup> Pembunuhan perempuan atau lebih dikenal dengan istilah berbahasa Inggris Femicide atau Feminicidio digunakan pada tahun 1974. Dan seiring waktu istilah femicide terus berkembang, dan pertama kali di resmikan dalam forum International Court for Crimes against Women yang dilaksanakan di Brussel, Belgia oleh Diana Russel seorang aktivis perempuan asal Afrika Selatan pada tahun 1976.<sup>41</sup> Femisida dapat diartikan sebagai tindakan pembunuhan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perempuan dengan alasan jenis kelamin atau gender nya, yang dipengaruhi oleh dominasi, hegemoni, superioritas misogini maupun agresi

---

<sup>39</sup> Arrizal Jaknanihan, “Un Dia Sin Nostoras Dan Gerakan Protes Terhadap Kekerasan Berbasis Gender Di Meksiko,” Foreign Policy Community of Indonesia Chapter UGM, last modified 2020, accessed March 8, 2024

<sup>40</sup> Muthia Nurul Maisyah, “Peran UN Women Dalam Mengatasi Femicide Di Meksiko Tahun 2014-2020,” eJournal Ilmu Hubungan Internasional 11, no. 2 (2023): 314–328,

<sup>41</sup> Lopez, “Femicide and Gender Violence in Mexico: Elements for a Systemic Approach.”

terhadap perempuan serta rasa kepemilikan akibat ketimpangan relasi dan kepuasan sadistik<sup>42</sup>.

Istilah Femisida telah diadopsi oleh hukum negara Meksiko, Meksiko menyatakan femisida sebagai kejahatan yang berbeda dan melanggar norma-norma dalam hukum terkait akses perempuan untuk hidup bebas dari kekerasan. Definisi femisida tercantum Undang-Undang yang dikeluarkan pada tahun 2007 (*General Law for Women's Access to a Life Free From Violence*). Femisida diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan seseorang/ individu dengan merampas kehidupan seorang perempuan dengan alasan gender sesuai yang tertera pada pasal 21 yang berbunyi:

*“Femicide violence is the most extreme form of gender violence against women produced by the violation of their human rights in public and private spheres and formed by the set of misogynist actions that can lead to the impunity of society and the State and culminate in homicide and other forms of violent death of women.”*

Sedangkan dalam hukum Meksiko femisida diartikan sebagai tindakan paling ekstrim dari kekerasan terhadap perempuan dengan alasan gender dan pelanggaran hak asasi perempuan di sektor publik maupun privat berdasarkan berbagai tindakan misoginis<sup>43</sup>. Alasan gender yang dimaksud meliputi keadaan seperti:

1. Korban telah direbut paksa kebebasannya dengan jangka waktu yang lama sebelum akhirnya dibunuh

---

<sup>42</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Lenyap Dalam Senyap*, ed. Rainy Maryke Hutabarat, 1st ed., 2022. Hal.11

<sup>43</sup> Ibid hal.38

2. Terdapat tanda-tanda kekerasan seksual pada tubuh korban
3. Memiliki riwayat hubungan secara emosional atau perasaan dan timbulnya kepercayaan dari korban kepada pelaku
4. Cedera atau mutilasi yang menimbulkan peradangan/memar dan merendahkan martabat, baik sebelum atau setelah kematian. Serta adanya tindakan nekrofilia yaitu perilaku seksual terhadap jenazah, Nekrofilia dianggap sebagai gangguan psikologis yang serius dan merupakan tindakan yang sangat merendahkan martabat manusia serta melanggar norma dan hukum dalam masyarakat yang telah dilakukan pelaku terhadap korban
5. Adanya data yang menyatakan riwayat dari segala bentuk kekerasan yang dilakukan pelaku pada korban dalam lingkungan pekerjaan, keluarga atau sekolah
6. Terdapat data yang menjelaskan adanya ancaman tindak pidana berupa pelecehan atau kekerasan yang dilakukan pelaku oleh korban
7. Jasad korban di ekspos atau dipamerkan dalam ruang publik

Femisida dalam perspektif gender dilihat dalam aspek sosial sejarah dapat dijelaskan sebagai bentuk manifestasi paling ekstrim dari budaya patriarki, yang mengaburkan batas-batas gender demi menjunjung hak istimewa para laki-laki yang berkembang secara sosial selama 30 tahun terakhir<sup>44</sup>. Dan jika dilihat dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) adalah masalah yang dapat diklasifikasikan menurut standar, hak, prinsip, pedoman serta kebebasan dilihat dari hukum

---

<sup>44</sup> Lopez, "Femicide and Gender Violence in Mexico: Elements for a Systemic Approach."

internasional. Femisida merupakan peristiwa sosial dan budaya yang berasal dari pikiran serta akar adat yang kuat. Para cendekiawan serta aktifis beranggapan bahwa femisida tidak hanya sebatas kejahatan belaka, namun juga impunitas yang telah melekat kuat. Faktor pendorong pada terjadinya tindakamn femisida secara berulang-ulang adalah impunitas, definisi dari impunitas itu sendiri merupakan pembebasan dari sanksi hukuman atau melepaskan diri dari denda<sup>45</sup> hal ini menjadi penyebab dari terjadinya berbagai kasus Hak Asasi Manusia.

Kekerasan berbasis gender di Meksiko telah menjadi perhatian masyarakat Internasional sejak akhir tahun 1990an dan awal tahun 2000-an<sup>46</sup>. Hal ini disebabkan terjadi pembunuhan terhadap perempuan dalam jumlah besar sebanyak 370 kasus di negara bagian Chihuahua lebih tepatnya di Ciudad Juarez. Hal ini dikarenakan pertempuran antar kartel untuk memperebutkan wilayah dalam penjualan narkoba di Meksiko. Selain itu banyak dari perempuan yang menjadi korban perampokan dan penculikan yang kerap dilakukan oleh para kartel narkoba<sup>47</sup>. Pada awal tahun 2000-an Meksiko sendiri mengalami tingkat kejahatan yang sangat tinggi seperti banyaknya masyarakat yang mengalami kekerasan yang mengakibatkan petugas keamanan menerima banyak kritikan baik dari sisi masyarakat dan pemerintah. Tercatat pada tahun 2004 hingga 2005 pemerintah melakukan survey terhadap perempuan dengan rentang waktu 15 hingga 39 tahun di Kota Ciudad Juarez. Dari hasil survey ini tercatat sebanyak

---

<sup>45</sup> “Apa Itu Impunitas?,” *Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan*, last modified 2022, accessed March 10, 2024, <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-impunitas/>.

<sup>46</sup> Olivia Adams, “Understanding the Dynamics of Femicide in Mexico,” *Vision Of Humanity*, accessed March 2, 2024, <https://www.visionofhumanity.org/understanding-the-dynamics-of-femicide-of-mexico/>.

<sup>47</sup> Teddy Farhan, “Tinjauan Konsep Segitiga Kekerasan Terhadap Kasus Femisida Di Meksiko Tahun 2019-2021.”

11% menyatakan bahwa mereka menerima tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para laki-laki. Namun banyak dari korban kekerasan ini berada dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan mereka takut untuk melaporkan kejadian ini ke pihak berwenang dikarenakan ancaman yang akan diterima oleh para korban.

### **2.1.1 Kategori Kasus Femisida**

Femisida menurut Komnas Perempuan dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu femisida langsung dan femisida tidak langsung<sup>48</sup>, femisida langsung merupakan tindakan pembunuhan yang sejak awal telah diniatkan untuk melakukan pembunuhan, sedangkan femisida tidak langsung merupakan tindakan pembunuhan yang terjadi karena tindak kekerasan berbasis gender dan tidak diniatkan untuk membunuh sejak awal

Tercatat dari pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan<sup>49</sup> dan pemberitaan media daring yang juga selaras dengan yang telah disusun oleh WHO, Pelapor Khusus Kekerasan terhadap Perempuan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, UN Women and UNODC, Deklarasi Wina dapat dikategorikan menjadi Sembilan kategori sebagai berikut.

1. Femisida Pasangan Intim merupakan tindakan pembunuhan yang terjadi dalam suatu hubungan dimana tindakan ini dilakukan oleh suami atau mantan suami maupun pacar atau mantan pacar.
2. Femisida Budaya, femisida ini terbagi dalam 6 kategori yaitu,

---

<sup>48</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Lenyap Dalam Senyap*.

<sup>49</sup> Ibid hal.15

- a. Femisida atas nama kehormatan, merupakan femisida yang dilakukan semata untuk menjaga kehormatan sebuah asosiasi atau keluarga. Pembunuhan perempuan ini terjadi disebabkan perempuan dianggap telah melakukan kesalahan, perzinahan, hamil diluar nikah dan diperkosa.
- b. Femisida terkait mahar, merupakan tindakan femisida yang terjadi karena masalah mahar dalam perkawinan maksudnya adalah ketika mahar tersebut tidak disetujui dengan keluarga calon suami
- c. Femisida terkait etnis, suku dan ras, merupakan femisida yang terjadi dalam lingkup masyarakat adat dimana perempuan yang menjadi korban tergolong dalam suatu etnis tertentu ataupun etnis minoritas
- d. Femisida terkait tuduhan sihir, merupakan tindakan femisida yang disebabkan oleh ilmu hitam seperti santet atau tuduhan sihir lainnya
- e. Femisida *Female Genital Mutilation* atau *Cutting* (FGM/C) atau Pelukaan dan Pemoangan Genitalia Perempuan (P2GP), merupakan tindakan femisida yang terjadi atas kontrol seksualitas seperti organ reproduksi perempuan yang mengakibatkan kematian pada anak perempuan dan perempuan dewasa
- f. Femisida terhadap bayi perempuan (menggugurkan kehamilan, infantisida, batita dan balita) merupakan tindakan femisida dimana korbannya merupakan seorang bayi perempuan karena dianggap tidak lebih berharga jika dibandingkan dengan seorang bayi laki-laki, hal ini

termasuk dalam tindakan aborsi terpilih dengan janin yang berjenis kelamin perempuan dan penyandang disabilitas.

3. Femisida dalam Konteks Perang dan Konflik Sosial Bersenjata<sup>50</sup>, merupakan femisida yang dilakukan oleh aktor negara maupun non negara dengan diawali oleh kekerasan fisik. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menyatakan bahwa kekerasan seksual menjadi senjata perang (*weapon of war*) dengan menargetkan para perempuan dalam konflik bersenjata. Banyak aktor negara ataupun non negara menggunakan cara ini dengan tujuan untuk merusak tatanan masyarakat dan menghancurkan mental, contohnya perempuan yang menjadi korban kekerasan seperti pemerkosaan akan dikucilkan oleh para masyarakat atau komunitas mereka.
4. Femisida dalam Konteks Industri Seks Komersial merupakan tindakan femisida dimana korbannya adalah para perempuan pekerja seks komersial yang dibunuh oleh pelanggannya atau kelompok tertentu yang disebabkan oleh rasa tidak terima akibat perselisihan biaya dan kebencian
5. Femisida terhadap Perempuan dengan Disabilitas merupakan tindakan femisida kepada perempuan dengan penyandang disabilitas dikarenakan kondisi disabilitas serta efek domino dari kekerasan seksual
6. Femisida terhadap Orientasi Seksual dan Identitas Gender merupakan tindakan femisida yang didasari oleh kebencian akan prasangka kepada minoritas seksual

---

<sup>50</sup> Alejandra Vela, *The Crisis Of Femicide in Mexico*, Journal Justice Studies and Forensic Science, Vol 11, No.2, 2023 Hal.6

7. Femisida di Penjara merupakan tindakan femisida yang terjadi di dalam penjara dimana korbannya merupakan para tahanan atau naprapidana perempuan
8. Femisida *Non Intim* (Pembunuhan Sistematis) merupakan pelaku dari tindakan femisida ini tidak memiliki hubungan apapun terhadap korban yang dilakukan oleh aktor negara maupun non negara dan terjadi secara acak
9. Femisida Terhadap Perempuan Pembela HAM (Hak Asasi Manusia) femisida ini juga dilakukan oleh aktor negara maupun non negara dengan menasar para perempuan yang memperjuangkan tentang HAM bagi masyarakat dan komunitas. Tujuan dari femisida ini karena dianggap akan mengancam kekuasaan dan kepentingan ekonomi dari suatu kelompok tertentu.

### **2.1.2 Jumlah Kasus Femisida Di Meksiko**

Meksiko sebagai negara dengan urutan kedua di wilayah Amerika Latin dengan tingkat femisida tertinggi. Tercatat pada tahun 2019 sebanyak 983 kasus dalam setiap 100.000 perempuan. Dengan rata-rata 10 wanita dibunuh setiap hari yang diakibatkan oleh kekerasan terhadap gender<sup>51</sup>. Salah satu contoh kasusnya pada tahun 2014 hingga 2017 tercatat 6297 kasus perempuan dibunuh, namun sekitar 30% kasus saja yang diselidiki oleh Protokol Kerja dan Investasi kasus femisida. Data ini merupakan data resmi yang dikeluarkan oleh *Justice Procuration Office and State Prosecution Offices to the National Citizen*

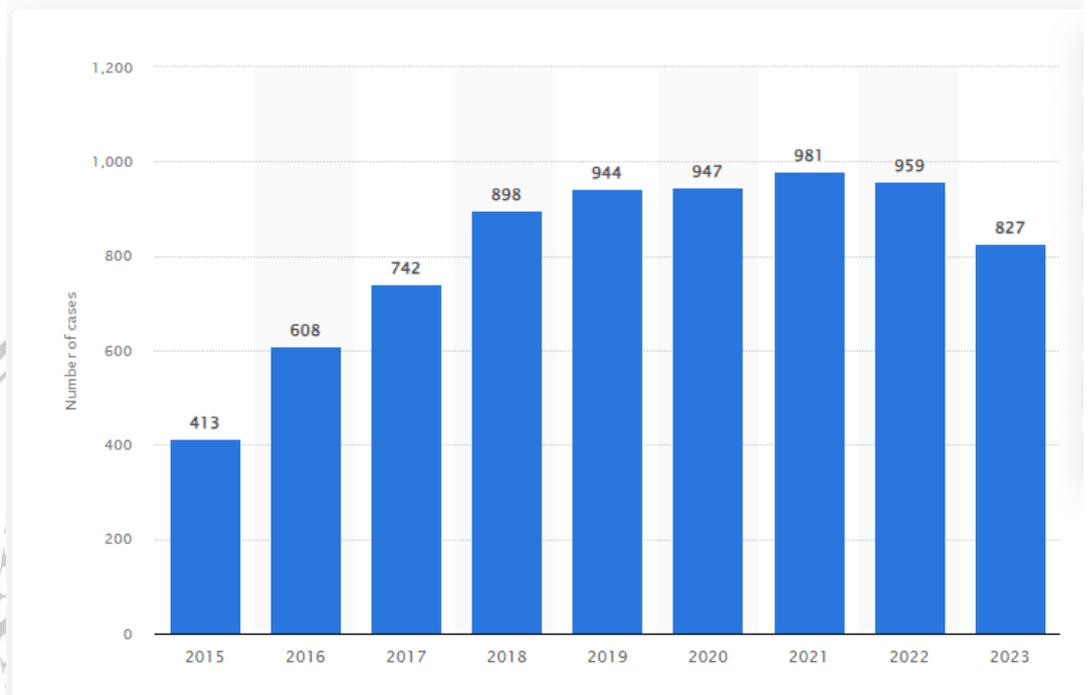
---

<sup>51</sup> Alejandra Marquez Guajardo, "Mexico's Other Epidemic: Murdered Women," *The Conversation* (Mexico, November 2019), <https://theconversation.com/mexicos-other-epidemic-murdered-women-132307>.

*Observatory of Femicide (OCNF)*. Oleh karena itu besar kemungkinan kasus yang tidak tercatat lebih banyak jumlahnya.

**Gambar 2.1 Korban Femisida Meksiko 2015-2023**

**Number of femicide victims in Mexico from 2015 to 2023**



Sumber : Statista

Terjadi peningkatan kasus yang sangat signifikan saat perpindahan pemerintahan dari presiden Enrique Pena Nieto di tahun 2017 dan pada tahun 2018 Meksiko dipimpin oleh Andres Manuel Lopez Obrador. *Secretariado Ejecutive del Sistema Nacional de Seguridad Publica (SESNSP)* atau Sekretariat Eksekutif Sistem Keamanan Publik Nasional Meksiko menjelaskan bahwa dalam rentang tahun 2015 hingga 2019 terjadi peningkatan kasus femisida sebanyak 139% dari 413 menjadi 944 kasus sehingga dapat dikatakan terjadi 10 kasus

femisida setiap harinya<sup>52</sup>. Jumlah kasus femisida pada masa pemerintahan Enrique Pena Nieto tercatat sebanyak 156.437 kasus yang telah dilaporkan, dimana kasus ini meningkat sebanyak 34.824 kasus lebih tinggi dibandingkan pada masa pemerintahan presiden Felipe Calderon<sup>53</sup>.

Pada tahun 2019 data dari *The United Nations Office for the Prevention of Crime and Drugs* menyatakan Meksiko sebagai peringkat pertama sebagai negara yang memiliki kasus femisida terbanyak. Dari bulan Januari hingga Juli 2020 kasus femisida khususnya femisida pasangan intim meningkat sebesar 7,7% dari tahun 2019. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh United Nations Women pada tahun 2021 menyatakan Meksiko cenderung menunjukkan peningkatan kasus femisida di tiap tahunnya. *Secretary of Security and Citizen Protection* di Meksiko menyatakan sebanyak 987 perempuan yang tewas diakibatkan oleh pembunuhan, dan 308 kasus diidentifikasi sebagai kasus femisida<sup>54</sup>.

Adanya wabah covid-19 menjadi juga menjadi salah satu alasan melonjaknya kasus femisida, karena kebijakan untuk stay at home menjadikan banyak dari perempuan diharuskan untuk tinggal dirumah, rumah yang dianggap sebagai tempat aman malah sebaliknya. Rumah menjadi salah satu tempat dari banyaknya kasus kekerasan. Selain itu lemahnya penanganan tindakan kekerasan

---

<sup>52</sup> Nur Zahrotul Hayati, "Kegagalan Meksiko Terhadap CEDAW Dalam Penanganan Femicide Pada Pemerintahan Presiden Andres Manuel Lopez Obrador 2019-2021," *Universitas Islam Indonesia* (2023): 31–41,

<sup>53</sup> Maisyah, "Peran UN Women Dalam Mengatasi Femicide Di Meksiko Tahun 2014-2020."

<sup>54</sup> Natalie Gallón, "Women Are Being Killed in Mexico at Record Rates, but the President Says Most Emergency Calls Are 'False,'" *CNN World*, July 16, 2020, <https://edition.cnn.com/2020/06/05/americas/mexico-femicide-coronavirus-lopez-obrador-intl/index.html>.

untuk menegakkan keadilan bagi para korban berdampak munculnya stigma impunitas dari adanya tindakan kekerasan sosial bagi para perempuan<sup>55</sup>

Setelah kasus pembunuhan ini pemerintah Meksiko akhirnya membentuk komisi yang membahas masalah femisida. Komisi ini kemudian mengeluarkan Undang-Undang Umum tentang Akses Perempuan Terhadap Kehidupan Yang Bebas Kekerasan yang kemudian diresmikan pada tahun 2007. Undang-undang ini berfungsi sebagai bentuk peringatan terhadap kekerasan gender. Dan pada tahun 2010 anggota parlemen Meksiko akhirnya menambahkan femisida ke dalam hukum pidana federal<sup>56</sup>. Femisida sendiri tidak sama dengan kasus pembunuhan biasanya, tindakan pembunuhan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti identitas perempuan, kondisi sosial serta latar belakang ekonomi, budaya dan sosial.

Meksiko memiliki kerangka hukum khusus terkait kejahatan femisida, alasan terbentuknya hukum khusus ini karena adanya Konvensi Inter-Amerika tahun 1994 yang membahas terkait pencegahan, penghukuman, dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2007 Partai Revolusi Demokratik mengeluarkan Undang-Undang Umum tentang Akses Perempuan ke Kehidupan yang Bebas dari Kekerasan. Undang-Undang ini merupakan langkah awal dari pemerintah yang kemudian memberikan pengaruh terhadap hukum pidana di Meksiko hingga saat ini tertera dalam Buku KUHP Federal Bab 5 Pasal 325<sup>57</sup>.

---

<sup>55</sup> Lopez, "Femicide and Gender Violence in Mexico: Elements for a Systemic Approach."

<sup>56</sup> Fabiola Sanchez & Fernanda Pesce, "Why Mexico Has Made Little Progress on Femicide," *PBS News Hour*, last modified 2022, accessed March 2, 2024,

<sup>57</sup> "Código Penal Federal Libro Segundo Título Decimonoveno - Delitos Contra La Vida y La Integridad Corporal Capítulo V - Femicidio," *JUSTIA*, last modified 2023, accessed March 11, 2024

Dalam pasal ini menjelaskan definisi femisida serta kasus pembunuhan seperti apa yang termasuk sebagai femisida. Dalam Undang-Undang ini pelaku dari tindakan femisida akan diberikan hukuman penjara selama 40-6- tahun. Selain itu pelaku juga akan putus hubungan dengan korban. Namun dalam proses pelaksanaannya Meksiko belum mampu untuk menerapkan hukuman ini kepada para pelaku dengan kasus kejahatan berbasis gender seperti femisida terlebih jika pelaku merupakan seorang aparat negara.

Selain itu pada tahun 2012 hadirnya kebijakan *War On Drugs* yang dikeluarkan oleh Presiden Felipe Calderon Hinojosa yang berlangsung sejak tahun 2006 hingga 2012. Kebijakan ini kemudian diteruskan oleh Presiden Enrique Pena Nieto di tahun 2012 hingga 2018. Pemerintah menilai untuk memberantas kekerasan langsung dengan melakukan intervensi sehingga hadirlah kebijakan *War On Drugs* ini. Namun diketahui sejak kebijakan ini diterapkan menelan korban sebanyak 500,000 kematian dan 250,000 orang yang dinyatakan menghilang<sup>58</sup>. Menurut Karla Quintana sebagai Kepala Registrasi Nasional menyampaikan data orang hilang sebanyak 61.637 dan diketahui sebanyak 26% merupakan perempuan<sup>59</sup>.

Pemerintah Meksiko telah melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi masalah kekerasan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan dan aturan. Meksiko mengadopsi Undang-Undang Federal untuk Mencegah dan Menghilangkan Diskriminasi di tahun 2014, dan ditahun yang sama Meksiko

---

<sup>58</sup> Fabiola Sanchez & Fernanda Pesce, "Why Mexico Has Made Little Progress on Femicide."

<sup>59</sup> Mubarak, Eriyanti, and Iqbal, "Kegagalan Kebijakan Pemerintah Meksiko Mengatasi Krisis Femicide ( The Failure Of Mexico Government Policy To Overcome Femicide Crisis ) Rohiman Mukti Mubarak , Linda Dwi."

mengadopsi *National Code of Criminal Procedures* yang menetapkan perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya pada tahun 2015 Undang-Undang General untuk Kesetaraan antara Laki-Laki dan Perempuan dengan melaksanakan kampanye secara permanen menjunjung kesetaraan<sup>60</sup>. Undang-Undang dan kebijakan yang bersifat diskriminatif mulai berkurang dikarenakan pemerintah Meksiko mulai mengadopsi kebijakan dan Undang-Undang yang bersifat untuk mendorong kesetaraan dan kebijakan untuk memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan keadilan ke tingkat yang lebih luas.

## **2.2 Faktor Pendorong Terjadinya Femisida**

Kasus Femisida di Meksiko memiliki sejarah panjang hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor seperti banyaknya kartel narkoba yang beroperasi dan bermarkas di Meksiko serta kentalnya budaya machismo atau patriarki. Kartel narkoba identik dengan tindakan kriminal, seperti kekerasan terhadap perempuan contohnya penjualan organ manusia, mengeksploitasi perempuan sebagai budak seksual yang akan berujung pada pembunuhan, dan tindakan suap-menyuap dengan tujuan membungkam pemerintah akibat tindakan yang dilakukan oleh kelompok tersebut.

### **2.2.1 Kartel Narkoba Di Meksiko**

Meksiko dikenal sebagai negara dengan tingkat kekerasan yang tinggi khususnya pada perdagangan narkoba dan perang antar kelompok bersenjata. Kelompok kejahatan terorganisir dikenal dengan sebutan kartel. Tindakan yang dilakukan oleh kartel ini cenderung untuk menyelundupkan zat dan obat-obatan

<sup>60</sup> Department of Economic and Social Affairs, *Leaving No One behind: The Imperative of Inclusive Development*, United Nations (New York: United Nations, 2016), <https://www.un.org/esa/socdev/rwss/2016/full-report.pdf>.

terlarang dan berperang untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya. Meksiko sendiri merupakan negara dengan markas kartel terbanyak dan terbesar di dunia. Pada tahun 2024 peringkat 1 hingga 4 kartel narkoba terbesar di dunia berada di Meksiko dengan wilayah operasi di Meksiko, Amerika Serikat, Amerika Tengah dan Amerika Selatan<sup>61</sup>. Peringkat pertama di diduduki oleh Kartel de Sinaloa yang dipimpin oleh Joaquin “El Chapo” Guzman dengan pendapatan tahunan sebesar USD 20 miliar, peringkat kedua adalah *Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG)* yang dipimpin oleh Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes dengan pendapatan tahunan USD 15 Miliar, peringkat ketiga Kartel Golfo yang dipimpin oleh Jose Antonio “Tony Tormenta” Medina dengan pendapatan tahunan sebesar USD 10 miliar lalu peringkat keempat adalah Kartel Zetas yang dipimpin oleh Heriberto Lazcano Lazcano dengan pendapatan tahunan sebesar USD 5 miliar.

Wilayah strategis yang dincar oleh para kartel adalah Chihuahua, Ciudad Juarez, para kartel ini memperdagangkan senjata, obat-obatan, manusia dan kendaraan curian. Sebelum perempuan digunakan sebagai objek kebrutalan, mereka disiksa sebagai bentuk ancaman dan peringatan terhadap kartel lawan ataupun hanya sebagai hiburan semata<sup>62</sup>. Dominasi kartel ini akhirnya membentuk lingkungan yang tidak aman karena dipenuhi dengan kekerasan akibat memperebutkan wilayah, konflik antar kartel ini menyebabkan peningkatan kekerasan di Meksiko semakin tinggi contohnya saat Kartel de Sinaloa perang melawan Los Beltran Levya, mereka mengirimkan pesan pada papan poster yang

---

<sup>61</sup> Muhaimin, *10 Kartel Narkoba Terbesar di Dunia, Ada Yang pendapatannya Rp 311 Triliun*, <https://international.sindonews.com/read/1298947/45/10-kartel-narkoba-terbesar-di-dunia-ada-yang-pendapatannya-rp311-triliun-1705294905> (13-05-2024, 14:29 WIB)

<sup>62</sup> Irina Popescu, *Bodies and Spaces of Femicidio: Feminist Performance Activism in Mexico*, *Liminalities: A Journal of Performance Studies*, Vol. 17, Nos. 1 & 2 (2021), hal.5

berisi ancaman untuk menunjukkan strategi memperluas wilayah dominasi dan menciptakan ketakutan di masyarakat.

Sejak tahun 2019 kelompok kartel narkoba terus menambah kasus femisida yang terjadi di Meksiko dengan tindakan kekerasan yang cenderung dilakukan seperti melakukan penculikan terhadap perempuan yang bertujuan untuk mengisi kekurangan anggota dan dipaksa menggunakan narkoba serta ditugaskan sebagai kurir untuk memastikan produk aman sampai tujuan. Selain menjadi pekerja, perempuan ini juga banyak menjadi korban pemerkosaan berujung kematian serta penghilangan korban. Penggunaan kekerasan ini akan menimbulkan trauma bagi para korban, keluarga hingga masyarakat yang membuat ketidaksetaraan gender<sup>63</sup>. Para perempuan dieksploitasi seksual dengan dipaksa untuk melakukan prostitusi atau budak seks bagi para anggota kartel. Para perempuan yang dipekerjakan akan di imingi kekayaan dan kesejahteraan hidup, dan jika menolak akan mendapatkan kekerasan.

Dalam konferensi pers untuk menanggapi tindakan tersebut Kepala Registrasi Nasional untuk Orang Hilang, Karla Quintana menyebutkan bahwa jumlah orang hilang sebanyak 61.637 orang dan 26% adalah perempuan. Data ini dikumpulkan setelah kebijakan untuk memerangi kartel narkoba pada masa pemerintahan Felipe Calderon di tahun 2006<sup>64</sup>.

---

<sup>63</sup> Witri Elvianti & Nanda Satria, *Continuous Yet Contentious: United Nations Agencies Roles and Mexico's Adoption of Women's Rights Protection Against Femicides(2018-2022)*, Islamic World and Politics, vol.7. No.2 Desember 2023, hal. 152

<sup>64</sup> Ian Collier, "Mexico Drug War: Almost 62,000 People Have Disappeared since 2006," *Sky News*, last modified 2020, accessed March 20, 2024, <https://news.sky.com/story/mexico-drug-war-almost-62-000-people-have-disappeared-since-2006-11902736>.

Untuk menjaga popularitas serta eksistensi, para kartel narkoba tidak jarang akan melakukan persaingan dengan sesama kartel, hal ini tentunya bertujuan untuk memperebutkan wilayah dan pasar penjualan. Para korban yang terbunuh merupakan target yang dianggap mampu untuk mengancam serta melemahkan lawan. Perempuan juga dinilai sebagai bagian dari musuh karena menjadi seorang istri, anak dan kerabat, sehingga mereka harus membayarnya dengan nyawa<sup>65</sup>. Dalam setiap kesuksesan transaksi narkoba maka akan menimbulkan disfungsi institusional serta penyelewengan dana seperti korupsi bbesar-besaran baik lokal maupun nasional. Ketika ekonomi gelap semakin meningkat pastinya akan memberikan dampak pada kinerja dari dalam proses penegakan hukum. Tidak hanya itu maraknya kegiatan kriminal tentu akan semakin merajalela yang akan merusak kredibilitas dari peradilan<sup>66</sup>. Para kartel narkoba ini juga mengadopsi budaya machismo, karena pasangan dari anggota kartel akan dianggap sebagai kepemilikan dari kartel tersebut, sehingga para perempuan wajib untuk mematuhi seluruh perintah yang diberikan anggota kartel tersebut sepanjang hidupnya

Dilihat dari posisi Geografis Meksiko yang berbatasan langsung dengan Amerika Serikat dan lemahnya tingkat keamanan di perbatasan kedua negara menjadikan Meksiko sebagai tempat ideal untuk melakukan transit narkoba<sup>67</sup>. Kartel narkoba menguasai pasar untuk menyelundupkan transaksi kokain dan

---

<sup>65</sup> Liga de Mujeres Revolucionarias, "Femicide in Mexico: Symptom of a Sick System," *In Defence of Marxism*, last modified 2020, accessed March 20, 2024, <https://www.marxist.com/femicide-in-mexico-symptom-of-a-sick-system.htm>.

<sup>66</sup> Nur Zahrotul Hayati, "Kegagalan Meksiko Terhadap CEDAW Dalam Penanganan Femicide Pada Pemerintahan Presiden Andres Manuel Lopez Obrador 2019-2021."

<sup>67</sup> Efragil Samosir, "Efektivitas Kerjasama Penanggulangan Peredaran Narkoba Ilegal ."

produk ilegal untuk memperoleh keuntungan. Tujuan ini diwarnai dengan tindakan kekerasan serta kriminalitas contohnya perdagangan dan penyelundupan manusia, pemerasan, pencucian uang serta pembunuhan. Para kartel narkoba ini juga kerap menyusup ke dalam pasukan keamanan dan menyuap pejabat pemerintah yang bertujuan untuk mengancam agar mereka mau menutup mata dengan bisnis ilegal yang mereka jalankan.

Kuatnya dominasi kartel narkoba direspon pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan war on drugs, kebijakan ini bertujuan untuk memberantas kartel di Meksiko. Kebijakan ini dikatakan berhasil sebab mampu untuk menangkap pemimpin kunci kartel Juarez yaitu El Chapo Guzman, namun pemerintah gagal untuk memprediksi kelahiran kelompok baru. Kebijakan ini memberikan dampak negative sebab meningkatkan kasus kekerasan khususnya pada perempuan, dimana kebijakan ini dianalogikan dengan kekerasan melawan kekerasan sehingga korban yang dihasilkan semakin besar. Korban pembunuhan ini juga banyak dari keluarga polisi seperti istri, anak, dan kerabat yang dilakukan oleh anggota kartel sebagai bentuk balas dendam, oleh sebab itu kebijakan war on drugs dan transaksi bisnis kartel narkoba menjadi penyebab tingginya kasus femisida<sup>68</sup>

### **2.2.2 Budaya Machismo**

Masyarakat Meksiko kerap mengadopsi nilai-nilai patriarki dari budaya machismo. Jika femisida dilihat melalui budaya machismo, machismo sendiri merupakan bentuk kehormatan yang dimiliki dalam jati diri laki-laki Meksiko.

---

<sup>68</sup> Rohiman Mukti Mubarak, Linda Eriyanti, Muhammad Iqbal, *Kegagalan kebijakan pemerintah Meksiko Mengatasi Krisis Femicide*, Journal of feminism and gender studies, Vol.1 No.1 2021, hal. 20

Bentuk kehormatan ini diimplementasikan para laki-laki dalam bentuk kepemimpinannya yang cenderung dominan untuk membina keluarganya, interaksi sosial dan bertahan hidup. Budaya Machismo sangat tertanam pada aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat Meksiko.

Bagi para laki-laki Meksiko bentuk kehormatan yang dibentuk oleh budaya Machismo ini menjadi pedoman kuat yang wajib untuk dipertahankan walaupun harus menggunakan kekerasan yang berdampak buruk bagi orang lain. Pedoman budaya machismo ini telah melekat dan kental dalam seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik. Budaya Machismo merupakan bentuk perwujudan dari sistem patriarki. Menurut seorang tokoh dalam teorisasi feminisme, Sylvia Walby dalam buku *Theorizing Patriarchy* patriarki merupakan sistem yang melakukan eksploitasi, opresi dan mendominasi para perempuan<sup>69</sup>.

Budaya Machismo yang terus diturunkan ini menjadi pemicu para perempuan dipandang sebagai objek atas kepemilikan yang segalanya diputuskan oleh kehendak laki-laki, sehingga dalam kasus femisida dapat dikatakan laki-laki dapat menentukan waktu kematian perempuan. Budaya Machismo diimplementasikan dalam pernikahan dan proses mengasuh anak. Dari masa anak-anak hingga menuju remaja, para laki-laki Meksiko diajarkan untuk bertahan hidup dan berkelahi yang bertujuan untuk mengalahkan siapapun yang dianggap sebagai ancaman dan musuh mereka, selain itu laki-laki ini akan mendapatkan kekerasan jika dinilai telah melanggar aturan yang berkembang di masyarakat.

---

<sup>69</sup> Dewi Candraningrum, "Karier Patriarki," *Redaksi Jurnal Perempuan*, last modified 2014, accessed March 14, 2024,

Akibatnya tindakan kekerasan dianggap sebagai hal yang lumrah untuk dilakukan dalam lingkup keluarga<sup>70</sup>. Melekatnya nilai-nilai Machismo yang diimplementasikan dalam lingkup keluarga dan pernikahan menjadikan perempuan wajib patuh terhadap kepala keluarga. Hal ini kemudian menimbulkan efek domino sebab dari kepatuhan ini para perempuan cenderung untuk tidak melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi. Dalam beberapa wilayah di Meksiko Barat para istri bertanggungjawab atas keadaan rumah tangga mereka yang kejam, hal ini menjadikan tindakan pelaporan terhadap kekerasan yang terjadi sangat sedikit karena para istri lebih memilih untuk menjaga kehormatan dan nama baik dari keluarga mereka daripada harus memberikan informasi dan mengeluhkan kekerasan yang dialami.

Budaya Machismo juga menjadi penyebab dari masih banyaknya kasus femisida yang terjadi, sebab budaya ini banyak menggagalkan upaya-upaya pemerintah dalam menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan contohnya adalah kampanye gender yang diatur dalam Undang-Undang *La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia* pasal 38. Contohnya pada bidang pendidikan, swasta dan lembaga ketenagakerjaan untuk mempromosikan kesetaraan gender dengan saling menghormati martabat antara perempuan dan laki-laki. Namun kenyataan dilapangan bahwa lembaga tersebut sangat tidak mengedepankan kesetaraan gender. Hal ini diperparah dengan pihak sekolah yang kerap menunjukkan sikap ketidakpedulian terhadap situasi kekerasan dalam lingkup sekolah seperti dalam ruang kelas. Dimana lembaga pendidikan

---

<sup>70</sup> Mubarak, Eriyanti, and Iqbal, "Kegagalan Kebijakan Pemerintah Meksiko Mengatasi Krisis Femicide (*The Failure Of Mexico Government Policy To Overcome Femicide Crisis*) Rohiman Mukti Mubarak , Linda Dwi."

dapat menjadi titik awal dalam merubah karakteristik anak-anak secara dini untuk mendukung program kesetaraan gender.

Diadopsinya budaya machismo dibanyak aspek sosial Meksiko, salah satunya dalam bidang pekerjaan adalah para perempuan menerima upah yang lebih rendah dibandingkan pekerja laki-laki meskipun mereka berada di tingkatan pekerjaan yang sama. Diketahui di wilayah Barat Meksiko, perempuan mendapatkan sepertiga dari upah yang diterima oleh laki-laki. Selain itu para pekerja perempuan juga banyak yang menerima ancaman kekerasan dan pelecehan seksual apabila terjadi kesalahan kerja. 12 dari 100 pekerja perempuan dilaporkan telah menerima tindakan kekerasan seksual di tempat kerja.

Budaya machismo yang memposisikan laki-laki di atas perempuan, dengan laki-laki yang dianggap memiliki kekuatan fisik dan dominasi yang sah menjadi legitimasi bagi para laki-laki untuk melakukan kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan pembunuhan, terhadap perempuan. Machismo dan patriarki memposisikan laki-laki sebagai kepala keluarga yang berhak mengendalikan situasi di dalam keluarganya. Ini menghasilkan kekerasan yang sering kali tidak dianggap sebagai tindak kejahatan, karena laki-laki dianggap berhak atas perempuan. Budaya machismo di Meksiko memainkan peran penting dalam meningkatkan kasus femisida. Machismo dan patriarki mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan yang sering kali tidak dianggap sebagai tindak kejahatan.

### **2.3 Landasan Kebijakan Pro-Perempuan yang anti-femisida**

Dalam upaya pemerintah Meksiko untuk menekan kasus femisida yang berada di Meksiko Presiden Andres Manuel Lopez Obrador mengeluarkan kebijakan Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024 dan *Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PIPASEVM)* 2021-2024 yang mana pada proses pembuatannya memiliki landasan hukum.

Pada Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024 memiliki landasan hukum yang mencakup konstitusi politik Meksiko, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Undang-Undang Umum tentang Kesetaraan antara Perempuan dan Laki-Laki), Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Undang-Undang Umum tentang Akses Perempuan terhadap Kehidupan Bebas Kekerasan), Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (Rencana Pembangunan Nasional 2019-2024), dan instrumen internasional yang diratifikasi oleh pemerintah Meksiko seperti Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Kebijakan ini keluar berlandaskan Konstitusi Politik Amerika Serikat Meksiko yang terbit dalam Berita Resmi Federasi pada 5 Februari tahun 1917 yang kemudian di amandemen pada tahun 2014. Pada pasal satu (1) bab 1 tentang Hak Asasi Manusia dan Jaminannya pasal ini berbunyi bahwa seluruh masyarakat di wilayah Amerika Serikat termasuk Meksiko wajib menerima hak asasi manusia

yang diakui dalam Konstitusi<sup>71</sup>. Dalam perjanjian internasional, Meksiko menjadi salah satu pihak yang mendukung perlindungan bagi rakyatnya, dan memiliki kewajiban untuk memajukan, menghormati, melindungi dan menjamin hak asasi manusia. Selain itu pasal ini juga mengatur bahwa setiap bentuk diskriminasi tidak dibenarkan atas suku, jenis kelamin, usia, kecacatan, status sosial, kondisi kesehatan, agama, pendapat, preferensi seksual, status perkawinan dan lainnya yang melanggar martabat manusia yang bertujuan merusak dan menindas hak dan kebebasan setiap orang. Dalam pasal empat (4) yang berbunyi “Laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum yang akan dilindungi oleh konstitusi”. Dalam pasal ini menyatakan bahwa kesetaraan gender harus diwujudkan tanpa adanya perbedaan kedudukan atau gender prioritas

Dalam Undang-Undang federal untuk Mencegah dan Menghapuskan Diskriminasi (*Ley Federal Para Prevenir Y Eliminar La Discriminacion*) yang diterbitkan dalam Berita Resmi Federasi pada 11 Juni 2003 yang kemudian diamandemen pada tahun 2023. Undang-Undang ini dibentuk berdasarkan munculnya gerakan anti-diskriminasi dan kesetaraan pada tahun 2001 oleh Komisi Warga untuk Studi Anti-Diskriminasi yang beranggotakan 160 komisaris dengan membentuk rancangan awal dari Undang-undang ini<sup>72</sup>. Dalam pasal 2 menjelaskan bahwa negara wajib untuk meningkatkan kebebasan dan kesetaraan masyarakat, dimana wewenang yang dimiliki publik federal berfungsi untuk

---

<sup>71</sup> *Constitucion politica De Las Estados Unidos Mexicanos*, Secretaria de Servicio Perlementari, [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/31662/Constitucion\\_Politica\\_1\\_.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/31662/Constitucion_Politica_1_.pdf) (19-05-2024,23:18)

<sup>72</sup> *Secretaria De Gobernacion, Ley federal para Prevenir y Eliminar la Discriminacion*, <https://www.conapred.org.mx/que-es-conapred/marco-normativo/ley-federal-para-prevenir-y-eliminar-la-discriminacion/> (20-05-2024, 00:42)

menghilangkan seluruh hambatan dalam proses menghapuskan diskriminasi. Selain itu pemerintah juga wajib untuk meningkatkan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam aspek politik, ekonomi, budaya dan sosial<sup>73</sup>.

Selain itu prinsip, tujuan, strategi *Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024* (PROIGUALDAD) ini selaras dengan Rencana Pembangunan Nasional 2019-2024, yang sesuai dengan sistem hukum dalam perencanaan nasional. Dalam Undang-Undang Perencanaan pasal 20<sup>74</sup>, menyatakan bahwa setiap kebijakan publik dan program harus melalui konsultasi dan partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat dengan tujuan untuk menyampaikan pendapat hal ini termasuk dengan para perempuan dengan berbagai profil sosial termasuk perempuan adat.

*Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024* (PROIGUALDAD) mematuhi poin-poin yang telah tercantum dalam Undang-Undang Perencanaan khususnya pada poin terkait persamaan hak bagi setiap individu, menghilangkan diskriminasi, mempromosikan kesetaraan gender dengan memberikan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki, mendorong peran perempuan dalam aspek sumber daya, pembangunan sosial dan aset. Pemerintah tentunya bertanggung jawab untuk pembentukan dan penerapan Kebijakan Nasional tentang Kesetaraan. Pemerintah sendiri menyatakan bahwa untuk mengaktifkan hak-hak perempuan terhadap kehidupan yang bebas dari

---

<sup>73</sup> Camara De Diputados Del H Congreso De La Union, *Ley federal para Prevenir y Eliminar la Discriminacion*, <https://www.conapred.org.mx/wp-content/uploads/2024/01/Ley-Federal-para-Prevenir-y-Eliminar-la-Discriminacion.pdf> (20-05-2024, 00:50)

<sup>74</sup> Camara De Diputados Del H.Congreso De La Union, *Ley De Planeacion* , [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/136526/ley\\_planeacion.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/136526/ley_planeacion.pdf) (21-05-2024, 11:08)

kekerasan dan keadilan akses dalam aspek nasional memerlukan parstisipasi dari seluruh lembaga pemerintahan.

Oleh karena itu sesuai dengan pasal 28 dan 30<sup>75</sup> Undang-Undang Institut Nasional untuk Perempuan menyatakan kordinasi untuk berpartisipasi dalam melaksanakan Program sesuai dengan kewenangan yang diusulkan dan ditandatangani dengan tujuan menghapus diskriminasi terhadap perempuan.

Sedangkan landasan hukum Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PIPASEVM) 2021-2024 Kebijakan ini berlandaskan pada Undang-Undang Umum tentang Akses Perempuan terhadap Kehidupan Bebas Kekerasan (LGAMLV) yang terkandung dalam pasal 35 yang menyatakan untuk menetapkan kewajiban pemerintah dan seluruh badan pemerintah untuk bekerjasama dalam menerapkan kebijakan publik, dan mengupayakan perwujudan pasal 42 Undang-Undang dimana SEGOB melalui CONAVIM mengembangkan dan memantau kebijakan PIPASEVM, dan peraturan LGAMVLV dalam pasal 48 yang menetapkan bahwa kebijakan PIPASEVM dibentuk dengan jangka waktu 6 tahun sekali dengan melihat Rencana Pembangunan Nasional dan Ketentuan Undang-Undang Perencanaan. Kebijakan ini berasal dari Rencana Program Pembangunan Nasional 2019-2024 yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan dan Pengkreditan Rakyat pada masa pemerintahan Andres Manuel Lopez Obrador<sup>76</sup>.

---

<sup>75</sup>Justia Mexico , Ley Del Instituto Nacional De Las Mujeres <https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-del-instituto-nacional-de-las-mujeres/capitulo-vii/> ( 21-05-2024. 12:10)

<sup>76</sup>Secretaria De Gobernacion & Commision Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (CONAVIM), *Programa integral para Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 2021-2024*, hal.4

Dimana kementerian Keuangan dan Pengkreditan Rakyat menyatakan pada pasal 40 dan 44 yang berbunyi

40 : Badan-Badan lembaga pemerintah akan bertanggung jawab untuk mematuhi program-program yang pelaksanaannya mereka ikuti dan untuk melaporkan kemajuannya.

44 : Demikian pula, mereka harus melaporkan dan mempublikasikan setiap tahunnya, pada website internet lembaga masing-masing, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Sekretariat, laporan tentang kemajuan dan hasil yang diperoleh setiap tahunnya sesuai dengan tujuan prioritas kebijakan dan parameter kesejahteraan yang terkandung dalam program.

Dasar hukum dikembangkannya PIPASEVM ini tercatat pada pasal 35, 41 dan 42 Undang-Undang Umum Akses terhadap Perempuan menuju Kehidupan yang Bebas Kekerasan, lalu pasal 35 Undang-Undang Umum tentang Akses Perempuan terhadap Kehidupan Bebas Kekerasan. Selain itu dalam Pasal 1. Konstitusi Politik Amerika Serikat menetapkan bahwa seluruh masyarakat akan menikmati Hak Asasi Manusia yang diakui dalam Konstitusi, pasal konstitusi ini juga berkewajiban untuk memajukan, menghormati, melindungi dan menjamin Hak Asasi Manusia dimana negara wajib mencegah terjadinya tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku dalam negara hukum.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Diario Oficial de la Federación, “Programa Integral Para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra Las Mujeres 2021-2024,” *Diario Oficial de la Federación* (2021).

## 2.4 Kebijakan Presiden Sebelumnya dalam Menurunkan Kasus

### Femisida

Kasus femisida yang telah terjadi sejak tahun 1990-an menjadi fenomena perhatian publik terutama dengan kasus-kasus terkenal seperti pembunuhan terhadap sejumlah perempuan di Ciudad Juárez. Kasus-kasus ini menunjukkan pola kekerasan yang sistematis terhadap perempuan di beberapa daerah di Meksiko. Oleh karena itu, banyak presiden Meksiko yang melakukan upaya dalam menangani kasus femisida ini seperti Presiden Ernesto Zedillo (1994-2000) yang berupaya dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dengan menciptakan lembaga federal pertama yang bertanggung jawab untuk memerangi kekerasan gender, yaitu National Institute for Women (Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES) pada tahun 1997.<sup>78</sup>

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) adalah lembaga federal di Meksiko yang didirikan pada tahun 1997 di bawah pemerintahan Presiden Ernesto Zedillo. Tujuan utama INMUJERES adalah mempromosikan kebijakan publik yang mendukung kesetaraan gender dan melindungi hak-hak perempuan di Meksiko. Lembaga ini berfungsi untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di tingkat nasional dan internasional, serta mendorong penerapan kebijakan yang mempromosikan kesetaraan gender, merancang dan mengimplementasikan kebijakan publik yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, termasuk strategi untuk mengurangi kekerasan terhadap

---

<sup>78</sup> Guadarrama Rico, L. A. (2020). *Embarazo adolescente en México: análisis de spots difundidos en una campaña nacional para la atención y prevención. Comunicación y Salud en América Latina: contribuciones al campo*, 215-238.

perempuan, menyediakan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah terkait masalah gender dan kekerasan terhadap perempuan.<sup>79</sup>

INMUJERES memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan upaya antar-lembaga untuk memperkuat perlindungan hukum dan pencegahan terhadap kekerasan gender, termasuk femisida, di Meksiko. Meskipun namanya telah berubah menjadi Instituto Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género (INMUJERES) untuk mencerminkan fokus yang lebih luas pada kesetaraan gender, peran utamanya tetap berkonsentrasi pada advokasi dan implementasi kebijakan pro-kesetaraan di seluruh negara.

Namun, pada perjalanan kebijakan ini tidak menunjukkan hasil yang signifikan karena INMUJERES lebih fokus pada advokasi untuk hak-hak perempuan, pengembangan kebijakan pro-kesetaraan, dan meningkatkan kesadaran tentang kekerasan gender. Upaya ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perempuan dan memperkuat sistem perlindungan mereka. Namun, untuk mengurangi kasus femisida secara signifikan, diperlukan koordinasi yang kuat antara lembaga-lembaga pemerintah, penegakan hukum yang efektif, perubahan budaya dalam masyarakat, dan berbagai faktor lainnya. Peningkatan jumlah kasus femisida di Meksiko menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam melindungi perempuan dari kekerasan. Meskipun demikian, peran INMUJERES dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender

---

<sup>79</sup> Beer, C. (2020). Womens policy agencies and federalism: INMUJERES in Mexico. In *Handbook on Gender, Diversity and Federalism* (pp. 245-261). Edward Elgar Publishing.

tetap krusial dalam upaya untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan aman bagi semua warganya.<sup>80</sup>

Kebijakan lain yang pernah dikeluarkan oleh Meksiko adalah *general law for women's access to a life free of violence* yang mana kebijakan ini berbicara mengenai Undang-Undang Umum tentang Akses Perempuan terhadap Kehidupan Bebas Kekerasan (*Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia*) adalah undang-undang federal di Meksiko yang diadopsi pada tahun 2007.<sup>81</sup> Undang-undang ini tidak terkait dengan kebijakan presiden tertentu, tetapi merupakan hasil dari kerja sama dan advokasi berbagai kelompok masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan pemerintah lokal dan nasional di Meksiko. Pengadopsian undang-undang ini mencerminkan komitmen Meksiko untuk melindungi perempuan dari kekerasan dan mempromosikan hak-hak mereka untuk hidup dalam keadaan bebas dari ancaman kekerasan apa pun. Undang-undang ini mendapatkan dukungan luas dan dianggap sebagai langkah maju dalam upaya melawan kekerasan gender di negara tersebut.

*Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia* berbicara mengenai upaya Meksiko yang bertujuan untuk melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan memastikan bahwa mereka dapat hidup tanpa ancaman kekerasan. Undang-undang ini mengakui hak setiap perempuan untuk hidup bebas dari kekerasan, termasuk kekerasan

---

<sup>80</sup> Beer, C. (2020). Womens policy agencies and federalism: INMUJERES in Mexico. In *Handbook on Gender, Diversity and Federalism* (pp. 245-261). Edward Elgar Publishing.

<sup>81</sup> De Diputados, C. (2021). *Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Última Reforma DOF 01-06-2021. México: DOF.*

dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pelecehan psikologis, dan segala bentuk diskriminasi berbasis gender. Poin dalam Undang-Undang ini meliputi perlindungan korban, pencegahan, hukuman dan keadilan. Undang-undang ini merupakan langkah penting dalam upaya Meksiko untuk melindungi hak-hak perempuan dan mengurangi kekerasan gender di negara tersebut.

Namun pada penjalanannya, undang undang ini juga tidak mampu dalam memberikan progress yang cukup signifikan karena pembunuhan yang disengaja terhadap perempuan karena gender meningkat sebesar 137% antara tahun 2015-2021. Pemerintah Meksiko gagal menerjemahkan undang-undang federal ini ke dalam tindakan lokal. Pemerintah gagal menyediakan sumber daya bagi masyarakat lokal dan gagal menyediakan ruang aman bagi perempuan di mana mereka dapat merasa dipercaya jika mereka melaporkan kekerasan yang terjadi. Terlepas dari peraturan yang ada, pemerintah Meksiko membiarkan perempuan mengurus diri mereka sendiri karena mereka tidak dapat menegakkan hukum secara memadai.